

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekonseptualisasi eksistensi MPR pasca reformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu hal yang sangat mendesak mengingat ketidakjelasan kewenangan yang dimiliki MPR, sehingga MPR hanya dianggap sebagai lembaga seremonial yang hanya menghabiskan anggaran APBN tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bangsa ini. Maka dari itu rekonseptualisasi merupakan suatu keharusan untuk memastikan apakah lembaga MPR saat ini masih diperlukan atau tidak. Alternatif pertama bisa dilakukan dengan penguatan kewenangan MPR dan juga mengembalikan esensi MPR sebagai lembaga permusyawaratan atau alternatif kedua dengan membubarkan MPR dan menjadikannya hanya sebagai forum gabungan antara DPR dan DPD untuk melakukan suatu kewenangan tertentu, misalnya melantik Presiden dan wakilnya, atau memberhentikan Presiden dan wakilnya dan mengamandemen UUD.
2. Faktor penghambat dan pendukung untuk merekonseptualisasi MPR yaitu yang menjadi penghambat antara lain: ketidaksepemahaman antar elit bilamana MPR digunakan oleh kalangan tertentu untuk menghambat pemerintah, pro-kontra dikalangan masyarakat maupun akademisi, harus memformat kembali

kewenangan sejumlah lembaga salah satunya DPD, agar DPR tidak semakin super power apabila MPR dikuatkan, mengingat $\frac{3}{4}$ anggota MPR adalah anggota DPR. Dan perlu menghidupkan kembali utusan golongan sebagai penyeimbangan keanggotaan DPR di MPR. Sedangkan faktor pendukung adalah agar MPR bisa lebih berkontribusi untuk bangsa, agar pemerintah tidak semaunya apabila ingin mengambil kebijakan atau program karena harus mengikuti GBHN yang ditetapkan oleh MPR, efisiensi anggaran apabila MPR dibubarkan dan hanya jadi forum gabungan antara DPR dan DPD dalam menjalankan kewenangan tertentu, serta memperjelas konsep parlemen yang digunakan oleh Indonesia. Mengingat konsep ketatanegaraan Indonesia khususnya parlemen tidak jelas akibat keberadaan lembaga MPR.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu untuk menegaskan kembali fungsi MPR baik melalui penguatan kewenangan atau pun menjadikan MPR hanya sebagai join session antaran DPR dan DPD untuk melaksanakan kewenangan tertentu.
2. Agar keberadaan MPR bisa memberikan manfaat dan kontribusi untuk bangsa ini dan bukan sebagai lembaga yang tidak produktif dan menghabiskan uang negara saja.